

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) dibentuk berdasarkan SK Mentan No. 403/Kpts/OT.210/6/2002 yang direvisi dengan Peraturan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.010/4/2016. BBP Mektan diberi mandat Nasional sebagai pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian dengan tujuan untuk menghasilkan inovasi teknologi mekanisasi pertanian yang dapat meningkatkan daya saing produk pertanian (produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah). Melalui peranan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian diharapkan adanya peningkatan dalam pendayagunaan hasil penelitian, perekayasaan dan pengembangan inovasi teknologi mekanisasi pertanian.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian berkomitmen dengan visi *“Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian bertaraf internasional yang menghasilkan inovasi teknologi pertanian yang berdaya saing”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan data/informasi dan inovasi IPTEK mekanisasi pertanian.
- Menyusun cetak biru kebutuhan teknologi mekanisasi pertanian untuk mendukung swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan.
- Meningkatkan penciptaan inovasi teknologi mekanisasi pertanian yang dapat meningkatkan daya saing produk pertanian.
- Meningkatkan intensitas pendampingan, magang, pelatihan, dan konsultasi pengembangan teknologi mekanisasi pertanian,
- Meningkatkan inovasi teknologi mekanisasi pertanian yang mengarah pada pengakuan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) secara nasional dan internasional,
- Meningkatkan diseminasi, jejaring kerjasama penelitian, perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian dengan lembaga nasional dan internasional.
- Meningkatkan kualitas penelitian koordinatif,

Mengoptimalkan sumberdaya penelitian, perekayasaan dalam rangka memacu peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dan perekayasaan (*scientific recognition*), dan prototipe alsintan yang dihasilkan secara efisien dan berdampak luas (*impact recognition*).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pengembangan Mekanisasi

Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	165.739.000,00	165.739.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	2.006.950.000,00	2.006.950.000,00
Jumlah Pendapatan	2.172.689.000,00	2.172.689.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.928.354.000,00	10.608.354.000,00
Belanja Lembur	81.788.000,00	81.788.000,00
Belanja Barang Operasional	1.642.760.000,00	2.308.627.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.896.319.000,00	1.029.200.000,00
Belanja Barang Persediaan	7.288.493.000,00	7.516.931.000,00
Belanja Jasa	1.807.580.000,00	1.153.210.000,00
Belanja Pemeliharaan	2.000.636.000,00	1.973.469.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.168.120.000,00	2.761.627.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	875.000.000,00	884.852.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja	31.689.050.000,00	28.318.058.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.873.048.039,00 atau mencapai 132,23% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.172.689.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	165.739.000,00	143.545.999,00	86,61
Pendapatan Jasa Lainnya	2.006.950.000,00	2.630.435.200,00	131,07
Pendapatan Lain-lain	0,00	99.066.840,00	0,00
Jumlah	2.172.689.000,00	2.873.048.039,00	132,23

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -11,11% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	143.545.999,00	22.390.000,00	541,12
Pendapatan Jasa Lainnya	2.630.435.200,00	3.183.692.000,00	-17,38
Pendapatan Lain-lain	99.066.840,00	25.875.078,00	282,87
Jumlah	2.873.048.039,00	3.231.957.078,00	-11,11

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp27.915.643.331,00 atau 98,58% dari anggaran belanja sebesar Rp28.318.058.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	10.690.142.000,00	10.482.582.123,00	98,06
Belanja Barang	16.743.064.000,00	16.550.345.519,00	98,85
Belanja Modal	884.852.000,00	883.275.899,00	99,82
Total Belanja Kotor	28.318.058.000,00	27.916.203.541,00	98,58
Pengembalian Belanja		-560.210,00	0.00
Total Belanja	28.318.058.000,00	27.915.643.331,00	98,58

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -0,03% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penyesuaian dan revocusing anggaran dalam rangka penanganan danantisipasi dampak pandemi Covid-19.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	10.482.021.913,00	10.711.764.936,00	-2,14
Belanja Barang	16.550.345.519,00	16.134.067.610,00	2,58
Belanja Modal	883.275.899,00	1.077.890.700,00	-18,06
Total Belanja	27.915.643.331,00	27.923.723.246,00	-0,03

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.482.021.913,00 dan Rp10.711.764.936,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -2,14% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang memasuki masa pensiun sebanyak 4 orang dan ada pegawai yang meninggal dunia 1 orang.

**Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.408.031.123,00	10.661.767.403,00	-2,38
Belanja Lembur	74.551.000,00	62.106.000,00	20,04
Jumlah Belanja Kotor	10.482.582.123,00	10.723.873.403,00	-2,25
Pengembalian Belanja Pegawai	-560.210,00	-12.108.467,00	-95,37
Jumlah Belanja	10.482.021.913,00	10.711.764.936,00	-2,14

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.550.345.519,00 dan Rp16.134.067.610,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,58% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan kegiatan baru yaitu kegiatan Rekayasa dan Pengembangan Mesin Penjual Otomatis untuk Bersas (Rice Vending Machine)
2. Adanya refocusing anggaran dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19 dan telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan banner dengan judul Jaga Kesehatan Bersama, cegah penularan infeksi.

Banner ini sebagai media untuk mengingatkan kepada siapa pun yang masuk ke kantor Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, agar menerapkan protokol kesehatan untuk memutus penularan covid-19.

- 2) Pengadaan Masker dan APD

Masker sangat diperlukan, bahkan merupakan kebutuhan pokok bagi pegawai, guna melindungi diri terhadap penularan yang bisa terjadi pada saat penderita mengalami batuk dan juga pilek. Masker disediakan setiap hari dan diperuntukkan bagi seluruh pegawai BBP Mektan yang melakukan WFO. Selain masker juga diadakan kaca mata untuk pegawai, dan face shield untuk tenaga keamanan (SATPAM) yang merupakan garda terdepan dalam menscreening pegawai dan tamu yang masuk ke BBP Mektan.

- 3) Hand Sanitizer dan Tempat/Wadah Hand Sanitizer

Hand sanitizer disediakan di setiap gedung, di pasang tempat-tempat yang strategis, dimana orang masuk kantor, bisa langsung melihat dan menggunakannya. Penyediaan hand sanitizer setiap hari dan masih terus disediakan sampai saat ini. Juga disediakan hand sanitizer spray untuk personal pegawai.

4) Penambah Daya tahan Tubuh

Penyediaan penambah daya tahan tubuh dimaksudkan untuk menjaga stamina pegawai. Penyediaan penambah daya tahan tubuh dilakukan pada masa darurat covid-19, yang dimulai sejak bulan Maret dan berakhir bulan Juni 2020. Penambah daya tahan tubuh yang disediakan berupa telur, madu, susu kotak atau bear brand,. Pada bulan puasa, penambah daya tahan tubuh tetap diberikan kepada pegawai yang melaksanakan kerja di kantor (WFO)

5) Pengadaan Vitamin

Vitamin diadakan untuk seluruh pegawai guna menambah daya tahan tubuh, agar tetap terjaga dan menaikkan imunitas tubuh. Produk yang disediakan adalah madu, vitamin, tolak angina, jahe merah, dan sebagainya.

6) Rappid Test dan Swab

Rappid test dilakukan guna mendeteksi apakah terdapat pegawai yang terindikasi reaktif terhadap penularan virus covid-19 ini. Pelaksanaan rappid test dilakukan oleh dokter dan tenaga medis dari Rumah Sakit Medika, BSD di kantor Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

- Rapid tahap I pada tanggal 18 dan 19 Mei 2020. Sesuai ketersediaan anggaran, rappid test bisa diikuti oleh 103 pegawai, dengan hasil rapid semua dinyatakan non reaktif.
- Rapid II dilaksanakan pada tanggal 17-18 September 2020 dengan diikuti oleh 169 pegawai ASN dan Non ASN, dengan hasil 3 pegawai dinyatakan reaktif. Selanjutnya dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari bagi pegawai yang reaktif, mulai tanggal 18 September-1 Oktober 2020.
- Bagi ketiga pegawai yang reaktif dilanjutkan dengan pemeriksaan melalui swab, pada tanggal 18 September 2020 dengan hasil 1 orang positif terinfeksi virus COVID-19.
- Dilakukan swab kedua untuk pegawai yang positif pada tanggal 30 September 2020, dengan hasil masih tetap positif. Sehingga dilakukan perpanjangan isolasi mandiri.

- Rapid test tahap III dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2020, dengan diikuti oleh 144 pegawai, dengan hasil semua Non Reaktif
- Rapid Test tahap IV dilaksanakan pada tanggal 17-18 Nopember 2020, diikuti oleh 128 pegawai dengan hasil 3 orang reaktif yang kemudian dilanjutkan dengan swab PCR dengan hasil 2 orang negative dan 1 orang positif. Untuk yang 1 orang positif dilakukan isolasi mandiri dan dilakukan swab PCR sampai dengan hasil negative.
- Rapid Test tahap V dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2020, dengan diikuti oleh 115 pegawai, dengan hasil semua Non Reaktif.
- Rapid tahap VI adalah dengan Anti gen Swab dilaksanakan pada tanggal 21 Desember, dengan diikuti oleh 42 orang pegawai, dengan hasil 1 orang positive, dan ditindaklanjuti dengan swab PCR hasil positive, sehingga dilakukan isolasi di tempat isolasi Pem kab Tangerang.

7) Desinfektan

Digunakan untuk:

- penyemprotan desinfektan pada seluruh ruangan, dilaksanakan seminggu sekali;
- Membersihkan benda-benda yang sering tersentuh tangan dengan desinfektan, dilakukan setiap hari;
- Digunakan sebagai bahan pada chamber mobil;
- Desinfektan khusus orang, digunakan sebagai bahan pada bilik desinfektan.

Tabel 11. Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2.299.538.826,00	1.459.646.124,00	57,54
Belanja Barang Non Operasional	1.002.317.650,00	1.925.938.450,00	-47,96
Belanja Barang Persediaan	7.513.279.179,00	4.929.826.750,00	52,40
Belanja Jasa	1.102.112.112,00	1.357.271.028,00	-18,80
Belanja Pemeliharaan	1.921.836.073,00	1.479.765.254,00	29,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.711.261.679,00	4.985.730.360,00	-45,62
Jumlah Belanja Kotor	16.550.345.519,00	16.138.177.966,00	2,55
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-4.110.356,00	-100,00
Jumlah Belanja	16.550.345.519,00	16.134.067.610,00	2,58

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp883.275.899,00 dan Rp1.077.890.700,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar -18,06% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena pada tahun anggaran berjalan tidak ada kegiatan belanja modal gedung dan bangunan, dan berkurangnya belanja modal peralatan dan mesin.
2. Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian pada tahun berjalan telah dialokasikan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan Chamber Car dan Bilik Desinfektan.

**Tabel 12. Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	883.275.899,00	1.077.890.700,00	-18,06
Jumlah Belanja Kotor	883.275.899,00	1.077.890.700,00	-18,06
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	883.275.899,00	1.077.890.700,00	-18,06

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp883.275.899,00 dan Rp1.077.890.700,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar -18,06% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pada anggaran tahun berjalan terdapat pengurangan belanja modal peralatan dan mesin.
2. Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian pada tahun berjalan telah dialokasikan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan Chamber Car dan Bilik Desinfektan.
 - a. Pengadaan chamber car melalui Tim Pengadaan barang dan jasa, yang mana alat ini sangat diperlukan. Alat ini dipasang di pintu masuk gerbang utama BBP Mektan. Sistem kerja alat ini adalah mengeluarkan embun/menyemprot pada kendaraan yang melewatinya, Tujuannya adalah agar kendaraan yang masuk di area BBP Mektan telah disterilkan.
 - b. Bilik Desinfektan, juga diadakan melalui Tim Pengadaan Barang dan Jasa BBP Mektan. Penempatan bilik desinfektan adalah di depan gedung utama, dengan tujuan agar setiap pegawai ataupun tamu yang datang ke BBP Mektan harus melalui bilik tersebut. Dengan demikian orang yang masuk

area BBP Mektan telah disterilkan melalui embun hasil semprotan dari bilik desinfektan tersebut.

Tabel 13. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	883.275.899,00	1.077.890.700,00	-18,06
Jumlah Belanja Kotor	883.275.899,00	1.077.890.700,00	-18,06
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	883.275.899,00	1.077.890.700,00	-18,06

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp35.851.200,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 14. Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	35.851.200,00
Jumlah	0,00	35.851.200,00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-179.256,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.780.790,00 dan Rp13.715.900,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 15. Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	958.000,00	470.000,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	1.620.000,00
Suku Cadang	325.365,00	11.625.900,00
Bahan Baku	3.497.425,00	0,00
Jumlah	4.780.790,00	13.715.900,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp861.340.860.000,00 dan Rp861.340.860.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59.150.973.569,00 dan Rp57.794.126.281,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 16. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2020**

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	57.794.126.281,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	876.347.288,00
Transfer Masuk	480.500.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	59.150.973.569,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-50.743.670.978,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	8.407.302.591,00

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian kelengkapan peralatan bengkel, peralatan rumah tangga dan pembuatan pemancar internet;
2. Transfer masuk dari Satker Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) Bogor berupa kendaraan roda empat.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp49.254.663.411,00 dan Rp38.334.502.606,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 17. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	38.334.502.606,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	10.920.160.805,00
Saldo per 31 Desember 2020	49.254.663.411,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-3.988.706.008,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	45.265.957.403,00

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa: Transfer masuk dari Satker Politeknik Pengembangan Pertanian (Polbangtan) Bogor yaitu berupa KDP renovasi Gedung Utama, Kantin, Asrama, Pintu Gerbang Kantor dan Pos untuk Pengemudi.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.064.385.200,00 dan Rp3.064.385.200,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp170.558.500,00 dan Rp170.558.500,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-56.005.806.101,00 dan Rp-47.215.147.087,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	59.150.973.569,00	-50.743.670.978,00	8.407.302.591,00
2.	Gedung dan Bangunan	49.254.663.411,00	-3.988.706.008,00	45.265.957.403,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.064.385.200,00	-1.273.429.115,00	1.790.956.085,00
4.	Aset Tetap Lainnya	170.558.500,00	0,00	170.558.500,00
Akumulasi Penyusutan		111.640.580.680,00	-56.005.806.101,00	55.634.774.579,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp256.781.000,00 dan Rp256.781.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 19. Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

Uraian	Nilai
Hak Cipta	300.000,00
Paten	256.481.000,00
Jumlah	256.781.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59.858.000,00 dan Rp59.858.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-226.640.472,00 dan Rp-201.371.836,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	256.781.000,00	-166.743.900,00	90.037.100,00
2.	Aset Lain-lain	59.858.000,00	-59.858.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		316.639.000,00	-226.640.472,00	89.998.528,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp26.979.640,00 dan Rp40.463.567,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	26.979.640,00	40.463.567,00
Jumlah	26.979.640,00	40.463.567,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp917.043.434.257,00 dan Rp913.613.476.941,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.607.830.000,00 dan Rp3.253.433.200,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 22. Perbandingan PNBP Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	717.400.000,00	793.751.200,00	-9,62
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	11.500.000,00	-100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	1.877.184.000,00	2.425.792.000,00	-22,62
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	14.150.000,00	-100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	9.700.000,00	5.600.000,00	73,21
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.546.000,00	2.640.000,00	34,32
Jumlah	2.607.830.000,00	3.253.433.200,00	-19,84

Jumlah pendapatan mengalami penurunan sebesar (19,84%) dibanding tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan berkurangnya aktivitas pengujian peralatan dan mesin.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10.482.021.913,00 dan Rp10.711.764.936,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**Tabel 23. Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	7.267.158.080,00	7.528.962.100,00	-3,48
Beban Pembulatan Gaji PNS	97.540,00	112.009,00	-12,92
Beban Tunj. Anak PNS	168.444.998,00	177.744.801,00	-5,23
Beban Tunj. Beras PNS	371.297.340,00	388.678.140,00	-4,47
Beban Tunj. Fungsional PNS	646.305.000,00	662.820.000,00	-2,49
Beban Tunj. PPh PNS	29.690.563,00	30.345.600,00	-2,16
Beban Tunj. Struktural PNS	149.785.000,00	124.365.000,00	20,44
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	620.201.392,00	637.972.286,00	-2,79
Beban Tunjangan Umum PNS	154.585.000,00	173.925.000,00	-11,12
Beban Uang Lembur	74.551.000,00	62.106.000,00	20,04
Beban Uang Makan PNS	999.906.000,00	924.734.000,00	8,13
Jumlah	10.482.021.913,00	10.711.764.936,00	-2,14

Pada tahun berjalan realisasi belanja pegawai mengalami penurunan sebesar (2,14%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena ada 4 pegawai yang memasuki masa pensiun dan 1 pegawai meninggal dunia.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.140.849.440,00 dan Rp2.163.177.720,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 24. Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019**

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	562.859.885,00	652.956.480,00	-13,80
Beban Persediaan konsumsi	1.523.063.555,00	1.310.137.440,00	16,25
Beban persediaan lainnya	54.926.000,00	200.083.800,00	-72,55
Jumlah	2.140.849.440,00	2.163.177.720,00	-1,03

Beban persediaan pada tahun berjalan mengalami penurunan sebesar (1,03%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena terkait dampak pandemi Covid-19.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.397.413.272,00 dan Rp4.762.367.415,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6.928.611,00	19.194.500,00	-63,90
Beban Bahan	290.828.850,00	1.052.366.950,00	-72,36
Beban Barang Non Operasional Lainnya	68.115.800,00	153.041.500,00	-55,49
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	600.094.626,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	143.460.000,00	124.800.000,00	14,95
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	183.390.000,00	170.400.000,00	7,62
Beban Honor Output Kegiatan	643.373.000,00	720.530.000,00	-10,71
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	132.905.950,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	563.131.820,00	648.040.200,00	-13,10
Beban Jasa Profesi	16.500.000,00	191.000.000,00	-91,36
Beban Keperluan Perkantoran	1.354.594.200,00	1.154.546.124,00	17,33
Beban Langganan Listrik	366.296.736,00	480.124.171,00	-23,71
Beban Langganan Telepon	9.793.679,00	623.970,00	1.469,58
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	18.000.000,00	9.900.000,00	81,82
Beban Sewa	0,00	37.800.000,00	-100,00
Jumlah	4.397.413.272,00	4.762.367.415,00	-7,66

Beban barang dan jasa pada tahun berjalan mengalami penurunan sebesar (8,23%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena adanya pengurangan kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.342.190.686,00 dan Rp4.249.411.984,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	737.191.015,00	494.487.730,00	49,08
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.184.645.058,00	985.277.524,00	20,23
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	809.390.680,00	540.302.820,00	49,80
Beban Persediaan suku cadang	4.610.963.933,00	2.229.343.910,00	106,83
Jumlah	7.342.190.686,00	4.249.411.984,00	72,78

Beban pemeliharaan pada tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 72,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena banyak kegiatan yang tertunda.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.711.261.679,00 dan Rp4.981.620.004,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	2.711.261.679,00	4.800.506.644,00	-43,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	181.113.360,00	-100,00
Jumlah	2.711.261.679,00	4.981.620.004,00	-45,57

Beban perjalanan dinas pada tahun berjalan mengalami penurunan sebesar (45,57%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan dampak dari pandemi Covid-19.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.781.606.221,00 dan Rp9.409.426.449,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Hak Cipta	4.286,00	4.286,00	0,00
Beban Amortisasi Paten	25.264.350,00	25.298.100,00	-0,13
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.469.188.412,00	1.227.915.118,00	19,65
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	94.928.514,00	94.928.514,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	289.122.511,00	289.122.511,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.903.098.148,00	7.772.157.920,00	-11,18
Jumlah	8.781.606.221,00	9.409.426.449,00	-6,67

Beban penyusutan dan amortisasi pada tahun berjalan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-16.354.284,00	-8.701.600,00	87,95
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	55.344.048,00	10.963.300,00	404,81
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	130.299.999,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	94.917.650,00	3.825.000,00	2.381,51
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.419.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.730.190,00	10.550.078,00	-74,12
Jumlah	268.356.603,00	16.636.778,00	1.513,03

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional mengalami kenaikan sebesar 1.513,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena adanya pemindahtanganan BMN.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp913.613.476.941,00 dan Rp1.061.021.882.161,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-32.978.977.352,00 dan Rp-33.007.877.786,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.252.896.948,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.344.405.000,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-91.508.052,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36.408.934.668,00 dan Rp-117.653.424.382,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 30. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	27.915.643.331,00
Diterima dari Entitas Lain	-2.873.048.039,00
Transfer Masuk	11.366.339.376,00
Jumlah	36.408.934.668,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-2.873.048.039,00 sedangkan DKEL sebesar Rp27.915.643.331,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.366.339.376,00 yang terdiri dari:

Tabel 31. Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018090200500941000KD	480.500.000,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018090200500941000KD	-34.321.429,00
3.	Konstruksi Dalam pengerjaan	018100200417402000KD	10.920.160.805,00
Jumlah			11.366.339.376,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp917.043.434.257,00 dan Rp913.613.476.941,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca pada Satker Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

DIPA Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian tahun anggaran 2020 telah mengalami perubahan/revisi sebanyak 8 (delapan) kali. Perubahan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Revisi pertama pada tanggal 27 April 2021 adalah perubahan revocusing anggaran dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid19. Pagu awal Rp31.689.050,00 menjadi Rp31.547.680.000,00;
2. Revisi kedua pada tanggal 19 Mei 2020 adalah perubahan pergeseran anggaran pada akun penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengubah pagu DIPA; pagu awal Rp31.547.680.000,00 menjadi Rp Rp31.547.680.000,00
3. Revisi ketiga pada tanggal 22 Juni 2020 tentang perubahan anggaran belanja yaitu pemangkasan pagu belanja karena adanya refocusing penanganan wabah Covid-19, sebagai berikut:
Pagu belanja semula Rp31.547.680.000,00 menjadi Rp26.781.608.000,00;
4. Revisi keempat pada tanggal 04 September 2020 adanya penambahan pagu pada akun perjalanan dinas.
Pagu awal Rp26.781.608.000,00 menjadi Rp26.917.408.000,00;
5. Revisi kelima pada tanggal 02 Oktober 2020 tentang perubahan kenaikan estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan adanya penambahan ijin penggunaan:
5.1 Estimasi pendapatan Rp1.233.410.000,00 menjadi Rp2.172.689.000,00
5.2 Pagu awal Rp26.917.408.000,00 menjadi Rp27.744.038.000,00;
6. Revisi keenam pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang perubahan pagu anggaran belanja karena adanya penambahan pagu pada akun penanganan Covid-19.
Pagu awal Rp27.744.038.000,00 menjadi Rp27..924.038.000,00;
7. Revisi ketujuh pada tanggal 01 Desember 2020 tentang perubahan pagu anggaran belanja karena adanya pergeseran pada akun untuk penanganan Covid-19.
8. Revisi kedelapan pada tanggal 10 Desember 2020 tentang penambahan pagu PNBP dan pemindahan akun dari biaya rapid/swab ke belanja daya tahan tubuh berupa belanja vitamin dan lain-lain untuk penanggulangan Covid-19.
Pagu awal Rp27.924.038.000,00 menjadi Rp28.316.058.000,00;